

KONSEP DASAR HUBUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DENGAN MASYARAKAT

Mukhtar Rosyid¹, M Aliful Khabib², Nurani³, Erjati Abbas⁴, Septuri⁵
(¹mukhtarrosyid98@gmail.com), (²malifulkhabib@gmail.com), (³nurani72@guru.sd.belajar.id),
(⁴erjati@radenintan.ac.id), (⁵septuri@radenintan.ac.id)
UIN Raden Intan Lampung

ABSTRACT

In the Indonesian context, there are still many challenges faced in building harmonious relationships between educational institutions and society. Some of these are disparities in access to education, lack of community involvement in the education process, and the mismatch of the curriculum with the needs of the job market. The aim of this research is the basic concept of the relationship between educational institutions and society holistically, with a focus on changing the educational paradigm towards inclusion and social empowerment. The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive methods. As for data collection techniques, by studying theories from various literature that are relevant to the research topic. The research results show that the relationship between educational institutions and society has an important role in the context of modern education. Changing the educational paradigm towards inclusion and social empowerment requires a deep understanding of how educational institutions can become agents of constructive social change. In addition, the imbalance in access and quality of education in society requires careful analysis to create fair opportunities for all individuals to access quality education.

Keywords: Public Relations Concepts, Basic Concepts, Educational Institutions

ABSTRAK

Dalam konteks Indonesia, masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam membangun hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah disparitas akses pendidikan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan, serta ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Tujuan penelitian ini konsep dasar hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat secara holistik, dengan fokus pada perubahan paradigma pendidikan menuju inklusi dan pemberdayaan sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun sebagai teknik pengumpulan data, dengan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat memiliki peran yang penting dalam konteks pendidikan modern. Perubahan paradigma pendidikan menuju inklusi dan pemberdayaan sosial menuntut pemahaman yang mendalam tentang bagaimana lembaga pendidikan dapat menjadi agen perubahan sosial yang konstruktif. Selain itu, ketidakseimbangan akses dan kualitas pendidikan di masyarakat memerlukan analisis yang cermat untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi semua individu dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Kata Kunci: Konsep Humas, Konsep Dasar, Lembaga Pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Namun, untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata, diperlukan kerjasama yang erat antara lembaga pendidikan dan masyarakat sekitarnya. Hal ini karena lembaga pendidikan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan lembaga pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi seperti sekarang, hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat menjadi semakin kompleks. Tuntutan akan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif menuntut adanya sinergi yang lebih kuat antara lembaga pendidikan dan masyarakat dalam menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di era global. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dasar hubungan antara lembaga pendidikan dengan

masyarakat agar dapat merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam membangun hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah disparitas akses pendidikan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan, serta ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, perlunya pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat guna mengidentifikasi permasalahan yang ada dan merumuskan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Tujuan penelitian ini konsep dasar hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat secara holistik, dengan fokus pada perubahan paradigma pendidikan menuju inklusi dan pemberdayaan sosial. Tujuan ini juga mencakup

analisis terhadap interaksi dan dinamika antara lembaga pendidikan dan masyarakat, serta mengeksplorasi cara-cara di mana hubungan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan studi pustaka. Adapun sebagai teknik pengumpulan data, dengan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Menurut Arikunto, terdapat empat tahap dalam studi pustaka yaitu, menyiapkan peralatan yang diperlukan, membuat bibliografi kerja, mengatur waktu dan membaca, dan mencatat bahan penelitian (Arikunto, 2019). Pengumpulan data melalui pencarian dan rekonstruksi berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Analisis konten dan deskriptif digunakan dalam proses analisis. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam

agar dapat mendukung proposisi dan gagasan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, yaitu baik lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat. Masing-masing pihak memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas baik dalam bentuk kontribusi berupa dukungan pikiran, ide, dan gagasan serta bantuan materiil yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Pada bagian ini dibahas konsep dasar Humas atau Public Relations yang dibatasi pada pengertian humas dan asas-asas kegiatan yang diperlukan.

a. Pengertian Humas

Istilah hubungan masyarakat atau public relations pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, Thomas Jefferson, pada tahun 1807. Pada saat itu yang dimaksud dengan public relations adalah foreign relations atau hubungan

luar negeri. Hingga kini pengertian humas masih menjadi bahan perdebatan para ahli. Oleh karena itu, agar pengertian humas menjadi jelas berikut ini dikemukakan beberapa pendapat ahli.

Glen dan Denny Griswold (1968) menyatakan bahwa "public relations is the management function which evaluates public attitudes, identified the policies, and procedures of an individual or organization with the public interest, and executes a program of action to earn public understanding and acceptance". Uraian tersebut berarti humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap publik, menyesuaikan kebijaksanaan dan prosedur instansi atau organisasi dengan kepentingan umum, serta menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat.

Oemi Abdurrahman (1975) menjelaskan humas sebagai upaya memperoleh pengertian, dukungan, kepercayaan, serta

penghargaan pada dan dari publik suatu badan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan keterangan dan batasan yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa humas adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama antara lembaga dan masyarakat dengan tujuan memperoleh pengertian, kepercayaan, penghargaan, hubungan harmonis, serta dukungan (goodwill) secara sadar dan sukarela.

b. Asas Kegiatan Humas

Agar kegiatan humas dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan sebagai pedoman. Menurut Ibnoe Syamsi (1969) terdapat enam asas kegiatan humas, yakni:

- 1) Asas pemberitaan resmi dan obyektif

Pada dasarnya setiap informasi yang diberikan oleh bagian humas adalah informasi resmi dari instansi. Oleh karena itu, informasi

humas harus obyektif dan tidak berlebihan.

2) Asas pemantauan keberesan intern instansi
Keberesan intern instansi juga tergambar dari moral yang ditegakkan, semisal para karyawan menegakkan sopan santun dan etika. Bawahan hormat kepada atasan, atasan memperlakukan bawahan dengan semestinya, dan karyawan santun melayani para tamu. Selain moral, terdapat juga unsur moril, yakni berkaitan dengan semangat, ketekunan dan giatnya karyawan.

3) Asas pertimbangan dan perusahaan dukungan public

Kegiatan yang diharapkan dapat memperoleh dukungan pun, kemungkinan besar harus didahului dengan usaha penyadaran publik tentang manfaat kegiatan humas. Hal itu dilakukan agar publik ikut mendukung dan mensukseskannya.

4) Asas pelaksanaan hubungan

Apabila hubungan dengan publik sudah berjalan, perlu menjaga hubungan tersebut dipertahankan dengan baik. Jangan sampai salah satu di antara publik merasa kecewa sehingga memutuskan hubungan kerjasama.

5) Asas pemerhatian opini public

Opini atau suara publik hendaknya diperhatikan dengan baik. Kritik- kritik, kelakuan-kelakuan, pertanyaan-pertanyaan, pendapat-pendapat, dan saran-saran membangun hendaknya diperhatikan pula.

6) Asas Peningkatan Mutu dan Kegiatan

Petugas humas harus memikirkan dan mengusahakan agar mutu kegiatan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan instansinya. Peningkatan mutu tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kecakapan

atau keahlian para petugas humas.

c. Karakteristik Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat

Humas pada lembaga pendidikan memiliki keunikan dibanding dengan humas pada bidang lainnya. Hal ini karena atmosfer edukatif yang melekat pada humas lembaga pendidikan. Berikut ini karakteristik humas lembaga pendidikan ditinjau dari sisi peran, struktur,

1) Peran Humas di Lembaga Pendidikan

Hubungan masyarakat merupakan salah satu elemen dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan.

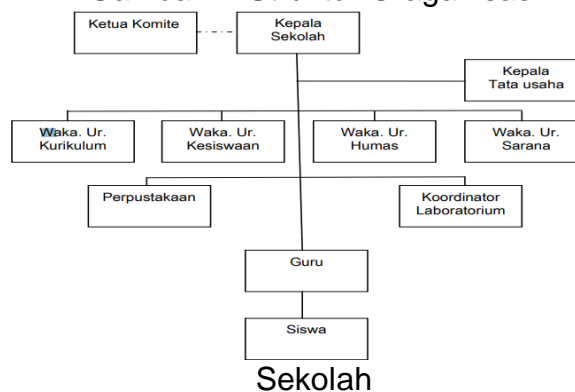
Pada aktivitas lembaga pendidikan yang kompleks keberhasilan hubungan dengan masyarakat menentukan pengembangan intitusi secara berkelanjutan. Hubungan masyarakat juga menentukan dukungan atau partisipasi publik (masyarakat) untuk

mendukung berbagai kebijakan dan program sekolah.

2) Humas dalam struktur organisasi sekolah

Mengingat pentingnya humas di lembaga pendidikan khususnya sekolah, secara khusus bidang tersebut dikelola oleh koordinator khusus terutama pada sekolah-sekolah yang lebih kompleks, misalnya SMP dan SMK/SMK. Kedudukan humas di lembaga pendidikan secara umum sebagai berikut.

Gambar 1. Struktur Oraganisasi



2. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai sumbangan

tenaga, uang, atau barang dalam rangka menyukseskan program atau proyek pembangunan. Dengan perkataan lain, partisipasi diartikan seberapa besar tenaga, dana, atau barang yang dapat disediakan sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah. Untuk memperoleh pengertian yang tepat mengenai konsep partisipasi masyarakat, terlebih dahulu perlu kita telusuri pengertian partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris *participate* yang berarti ikut mengambil bagian.

Menurut Soegarda Poerbakawada (1981: 251), partisipasi adalah suatu gejala demokrasi tempat orang-orang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan segala sesuatu yang berpusat pada berbagai kepentingan. Orang-orang juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan Tingkat kematangan dan tingkat kewajiban mereka. Partisipasi dilakukan dalam bidang fisik maupun bidang material serta dalam bidang penentuan kebijakan.

Davis dalam Mulyono, (1987: 25) mengungkapkan tiga pokok pikiran dalam partisipasi, yaitu:

- 1) adanya keterlibatan mental dan pikiran;
- 2) adanya kemampuan bertindak atau bekerja;
- 3) adanya tanggung jawab terhadap pemasalahan kelompok dalam mencapai tujuan.

b. Dasar Pelibatan Masyarakat dalam Pendidikan

Dasar pelibatan masyarakat dapat ditinjau dari segi yuridis maupun empiris. Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab III pasal 4, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Selain dari aspek yuridis, dasar pelibatan masyarakat dalam pendidikan dapat ditinjau dari dua pangkal, yaitu:

- 1) Kesamaan Tanggung Jawab

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua,

dan masyarakat. Masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok dan individu-individu yang berusaha menyelenggarakan pendidikan atau membantu usaha-usaha pendidikan.

Dalam masyarakat terdapat berbagai organisasi penyelenggara pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi kepramukaan, organisasi politik, organisasi sosial, organisasi olahraga, atau organisasi kesenian yang bergerak dalam usaha pendidikan. Dalam masyarakat juga terdapat individu-individu atau pribadi-pribadi yang bersimpati terhadap pendidikan di sekolah.

2) Kesamaan Tujuan

Sekolah menghendaki agar para siswanya kelak menjadi manusia pembangun yang Pancasilais. Masyarakat juga menghendaki agar semua warga negara menjadi manusia pembangun yang Pancasilais. Individu yang Pancasilais diharapkan datang dari sekolah. Oleh karena itu, antara sekolah dan masyarakat

harus mempunyai kesamaan tujuan.

Secara empiris dan fundamental, keterbatasan instansi pendidikan secara alamiah menyebabkan perlunya pelibatan masyarakat.

c. Tujuan dan Manfaat Pelibatan Masyarakat

Paling tidak ada dua hal yang menjadi tujuan pelibatan masyarakat yaitu:

1) Saling Saling Membantu Saling Mengisi

Waktu belajar siswa di sekolah sangat terbatas, yaitu tujuh jam. Di luar sekolah mereka berada di rumah atau di lingkungan. Waktu senggang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan atau organisasi, misalnya kegiatan kepramukaan, keolahragaan, kesenian, dan keagamaan.

Selain itu, masyarakat dapat pula menyelenggarakan pendidikan yang bersifat spesialisasi, misalnya pendidikan keahlian.

2) Membantu Keuangan, Bangunan, dan Barang

Pendidikan yang baik membutuhkan ruang belajar,

alat bantu, dan dana yang cukup. Dana yang terdapat di sekolah biasanya terbatas sehingga memerlukan sumber dana yang berasal dari sumber lain, antara lain yang berasal dari masyarakat dengan berbagai bentuk.

Pelibatan masyarakat juga akan memberi manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi lembaga sendiri maupun masyarakat yang dilibatkan. Pariata Westra (1977: 18) menguraikannya sebagai berikut:

- a) Memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar.
- b) Memungkinkan para staf menggunakan kemampuan berpikir secara kreatif.
- c) Mengembalikan nilai-nilai martabat manusia (humanity), dorongan (motivasi), serta membangun kepentingan bersama.
- d) 4) Mendorong orang untuk lebih bertanggung jawab.
- e) 5) Memperbaiki semangat kerja sama serta menimbulkan kesatuan kerja (team work).

- f) 6) Memungkinkan untuk mengikuti perubahan-perubahan atau mencapai kemajuan.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan akan berdampak juga pada masyarakat itu sendiri dalam bentuk nilai balik yang bisa bersifat wawasan bahkan ekonomis.

d. Prasyarat Partisipasi Masyarakat

- 1) Tersedianya waktu yang cukup untuk mengadakan partisipasi karena partisipasi sulit dilaksanakan dalam keadaan serba darurat
- 2) Pembiayaan partisipasi hendaknya tidak melebihi hasil-hasil yang akan diperoleh serta memperhatikan segi-segi penghematan;
- 3) Pelaksana partisipasi harus memandang pentingnya keberadaan kelompok kerja yang akan dipartisipasikan;
- 4) Peserta partisipasi harus mempunyai kemampuan

khusus sehingga efektif untuk diparticipasikan;

- 5) Pelaku partisipasi harus dapat berhubungan secara timbal balik sehingga dapat saling bertukar ide dengan pengertian dan bahasa yang sama;
- 6) Tidak ada pihak-pihak yang merasa bahwa posisinya terancam akibat adanya partisipasi.
- 7) Partisipasi akan lebih efektif jika didasarkan asas kebebasan bekerja.

e. Bidang Kerja Sama Sekolah dengan Masyarakat

Bidang kerjasama sekolah dengan masyarakat mencakup banyak aspek, antara lain dalam hal:

- 1) Pendidikan Moral
- 2) Pendidikan Olahraga
- 3) Pendidikan Kesenian
- 4) Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
- 5) Pendidikan Keterampilan

f. Bentuk dan Sifat Partisipasi Masyarakat

UU no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada bagian ke satu

pasal 54 menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Ayat kedua pasal tersebut menyebutkan masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Wujud partisipasi masyarakat sebagaimana disampaikan Dusseldorp dalam Subandiyah (1989: 12) antara lain sebagai berikut:

- 1) Mendatangi pertemuan;
- 2) Melibatkan diri dalam diskusi;
- 3) Melibatkan diri dan berpartisipasi dalam segala aspek organisasi, misalnya menyelenggarakan pertemuan kelompok, mempengaruhi orang luar untuk ikut dalam kegiatan kelompok, serta memimpin diskusi kelompok;
- 4) Membantu untuk memperoleh bantuan

tenaga, modal, fasilitas, dan kemampuan mental;

- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
- 6) Berperan dalam pemanfaatan hasil

3. Klasifikasi Publik Pendidikan

Peran dan tugas hubungan masyarakat adalah menciptakan, membina, dan mengembangkan hubungan baik dengan publik atau stakeholders pendidikan. Kasali (2005:63) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan stakeholders adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar organisasi yang memiliki peran dalam menentukan keberhasilan lembaga. Lebih lanjut Kasali (2005:64) menjelaskan stakeholders pendidikan menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal.

Apabila pendapat tersebut diadaptasi dalam bidang pendidikan, maka stakeholders dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pengelompokan

Stakeholders Internal	Stakeholders Eksternal
Siswa	Siswa
Manajemen	Orangtua

Karyawan	Pemerintah
Keluarga Karyawan	Pesaing/Lingkungan

Stakeholders Pendidikan

Tinjauan lain tentang klasifikasi publik sebagaimana dikemukakan oleh Soemirat dan Ardianto dkk (2004) adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Klasifikasi Publik

Klasifikasi	Stakeholders Eksternal
Publik internal dan publik eksternal	Publik internal: publik yang berada di dalam lembaga, publik eksternal: Publik yang berada di luar lembaga
Publik primer, sekunder, dan marginal	Urutan publik didasarkan pada prioritas lembaga yang perlu diperhatikan lembaga
Publik tradisional dan publik masa depan	Pegawai dan pelanggan adalah publik tradisional, sedangkan seperti konsumen potensial,

4. Bentuk dan Proses Kegiatan Humas Pendidikan

a. Jenis dan Teknik Kegiatan Humas Lembaga Pendidikan

Klasifikasi jenis kegiatan humas dapat didasarkan pada sasaran yang dituju. Tinjauan ini membedakan jenis kegiatan humas ke dalam 2 bagian, yaitu humas keluar (humas eksternal) dan kegiatan humas ke dalam (humas internal).

1) Kegiatan Eksternal

Kegiatan ini selalu dihubungkan dan ditunjukkan kepada publik atau masyarakat di luar sekolah. Terdapat dua kegiatan yang dapat dilakukan, yakni kegiatan tidak langsung dan kegiatan langsung atau tatap muka. Kegiatan tidak langsung adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui perantaraan media tertentu. Kegiatan langsung atau tatap muka adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung, misalnya rapat dengan pengurus Komite Sekolah, konsultasi dengan tokoh masyarakat, dan melayani kunjungan tamu.

2) Kegiatan Humas Internal

Sasaran humas internal adalah warga sekolah, yakni para guru, tenaga administrasi (tata usaha), dan para siswa. Pada prinsipnya kegiatan internal bertujuan untuk:

- a) memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan dan
- b) perkembangan sekolah;

c) menampung saran dan pendapat warga sekolah yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan sekolah;

d) memelihara hubungan harmonis sehingga tercipta kerjasama antar warga sekolah

b. Proses Humas

Aktivitas humas berpusat pada bagaimana memahami perasaan dan sikap publik, dengan demikian indikator keberhasilan proses humas adalah kemampuannya dalam mengubah sikap atau yang dipersepsikan publik. Oleh karena itu, proses humas selalu dimulai dan diakhir dengan penelitian terhadap sikap atau persepsi publik (Kasali, 2005: 82).

Proses humas menurut Kasali (2005: 82-85) meliputi 1) identifikasi permasalahan, 2) perencanaan dan penyusunan program, 3) aksi dan komunikasi dan 4) evaluasi. Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal yang penting dalam proses humas, di mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam

permasalahan atau tantangan yang dihadapi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di bab sebelumnya, kami dapat menyimpulkan bahwasannya hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat memiliki peran yang penting dalam konteks pendidikan modern. Perubahan paradigma pendidikan menuju inklusi dan pemberdayaan sosial menuntut pemahaman yang mendalam tentang bagaimana lembaga pendidikan dapat menjadi agen perubahan sosial yang konstruktif. Selain itu, ketidakseimbangan akses dan kualitas pendidikan di masyarakat memerlukan analisis yang cermat untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi semua individu dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Proses humas dalam lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Asas-asas kegiatan humas, seperti pemberitaan resmi dan obyektif serta pemantauan keberesan intern instansi, menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan humas yang efektif.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, integrasi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta persiapan peserta didik untuk menghadapi tuntutan dunia kerja menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat menjadi krusial dalam mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya sebagai instrumen pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesejahteraan sosial dan kemajuan bersama.

Dengan demikian, kesimpulan holistik dari makalah ini adalah pentingnya kolaborasi yang erat antara lembaga pendidikan dan masyarakat dalam menciptakan dampak positif bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Silviani, Irene. Public relations sebagai solusi Komunikasi Krisis. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Kartini, Nim. Pelaksanaan Manajemen Humas Dalam Mempromosikan SMP Negeri 10 Palembang. Diss. UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Sukarto, Kasno Atmo. "Konjungsi Bahasa Indonesia: Suatu Tinjauan." Pujangga: Jurnal Bahasa dan Sastra 3.1 (2017): 103-118.
- Jawa, Yuliana, and Teresia Noiman Derung. "Partisipasi Mahasiswa STP-IPI Malang sebagai Calon Katekis dalam Kegiatan Doa di Lingkungan." In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi* 3.9 (2023): 202-206.
- Utami, Rida. Partisipasi Komite Sekolah Dalam Pengembangan Sarana Dan Prasarana Di Madrasah Tsanawiyah Fadhilah Pekanbaru. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- No, Undang-Undang Republik Indonesia. "Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Bab II Pasal 3.(2006)." Bandung: Fermana (20).
- Westra, Pariata, and Syamsi Sutarto. "Ensiklopedi Administrasi." (No Title) (1977).
- Simanjuntak, Kardin M. "Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 7.2 (2015): 111-130.
- Kurniyati, Yuni. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.